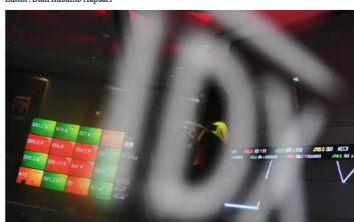


	News Title : Kemendag Kembali Tertibkan Robot Trading Ilegal	
	Media Name : Validnews.id	Journalist : Khairul Kahfi
	Publish Date : 28 January 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Veri Anggrijono (Dirjen PKTN Kemendag), Sihard Hadjopan Pohan (Direktur Tertib Niaga), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : robot trading forex ilegal

Kemendag Kembali Tertibkan Robot Trading Ilegal

Pohan menggarisbawahi, pelaku usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan berusaha dapat dikenakan ketentuan pidana.

Pemulis: Khairul Kahfi
Editor: Dian Kusumo Hapsari



Pegawai memantau di dekat monitor perdagangan indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 26 Jan (12/2022)
ANTARA FOTO/Indah Mahawati A

JAKARTA - Pemerintah kembali menindak tegas terhadap usaha penjualan dengan skema expert advisor atau robot trading tak berizin. Tindakan tegas dilakukan kepada PT DNA Pro Akademi pada Jumat (28/1) di Jakarta.

Kegiatan penindakan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) dan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal.

Dirjen PKTN Kemendag Veri Anggrijono menjelaskan, kegiatan penertiban merupakan hasil temuan pengawasan terhadap PT DNA Pro Akademi. Perusahaan tersebut telah menjalankan kegiatan usaha penjualan expert advisor/robot trading dengan menggunakan sistem MLM.

"(Kegiatan perdagangan) atas dasar legalitas berupa nomor induk berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 47999; perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya, yang belum berlaku secara efektif, terverifikasi, atau tidak memiliki izin usaha penjualan langsung," tegas Veri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (28/1).

Sementara itu, Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan usaha penjualan langsung (direct selling) termasuk dalam kategori risiko tinggi.

Pohan menggarisbawahi, pelaku usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan berusaha dapat dikenakan ketentuan pidana. "Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja-Sektor Perdagangan," tutur Pohan.

Sementara itu, Plt Kepala Bappebti Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, dalam melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Sebagai tindakan preventif awal, masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha di www.bappebti.go.id. Wisnu juga berharap, agar pelaku usaha menjalankan bisnis sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

"Pelaku usaha diharapkan mematuhi ketentuan dalam UU 10/2011 tentang Perubahan UU 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," ungkap Wisnu.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menambahkan, kegiatan pengamanan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak taat ketentuan. Serta memberikan contoh kepada pelaku usaha lain agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan.

"Kegiatan ini juga dilakukan oleh Kemendag sebagai anggota Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi untuk menindaklanjuti keputusan Satgas yang telah melarang kegiatan usaha PT DNA Pro Akademi pada Januari 2022," tambah Aldison.

Imbauan Satgas Waspada Investasi

Terpisah, SWI meminta masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut;

- 1 Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut, memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
- 2 Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
- 3 Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawaran, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.